

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAPALUS COVID-19 DI DESA KANONANG SATU,  
KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT, KABUPATEN MINAHASA**

**SRIKANDI TRIPUTRI POLI**

**JOHNNY H. POSUMAH**

**RULLY MAMBO**

*Abstract*

*This research was conducted to determine how the implementation of the Mapalus Covid-19 Program in Kanonang Satu Village. This research uses qualitative research. The theory used is based on variables that affect implementation performance, namely Policy Standards and Targets, Resources, Characteristics of Implementing Organizations, Inter-Organizational Communication, Dispositions or Attitudes of Implementers and Social, Economic and Political Conditions. Data collection techniques used in this study, namely: interviews, observation (observation) and study documentation / secondary data collection. The results of this study indicate that the implementation of the Covid-19 Mapalus Program in Kanonang Satu Village has been running well in terms of policy standards and targets, resources, characteristics of the implementing organization, communication between organizations, dispositions or attitudes of the implementers and social, economic and political conditions. The government must further increase programs that encourage public creativity for the welfare of the community itself and the government must continue to encourage and increase community participation and provide the widest possible space for the community to be able to actively take part in the Mapalus Covid-19 Program.*

*Keywords: Implementation, Mapalus, Society, Government.*

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Mapalus Covid-19 di Desa Kanonang Satu. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teori yang digunakan berdasarkan variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi/pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Mapalus Covid-19 di Desa Kanonang Satu sudah berjalan dengan baik dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah harus lebih meningkatkan program-program yang mendorong kreativitas masyarakat guna untuk kesejahteraan masyarakat sendiri dan pemerintah harus terus mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat secara aktif ikut ambil bagian dalam Program Mapalus Covid-19 ini.

**Kata kunci: Implementasi, Mapalus, Masyarakat, Pemerintah.**



## PENDAHULUAN

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul ditengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi. Akibat kasus Covid-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan *social distancing*, mengeluarkan himbauan untuk *Work From Home* (WFH) bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan Covid-19 dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa dengan bebas melakukan segala kegiatan di luar rumah, salah satunya yaitu kegiatan bekerja, beberapa jenis pekerjaan yang dapat menerapkan sistem *Work From Home* misalnya pekerja kantoran (swasta) maupun instansi pemerintahan. Di Desa Kanonang Satu sendiri memiliki budaya yang masih melekat seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, yaitu budaya mapalus.

Dalam penataan penanganan Covid-19, harus memerlukan strategi khusus yang menyentuh masyarakat Desa Kanonang Satu, dan salah satu hal yang digagas oleh pemerintah desa, hukum tua yang selain kepala pemerintahan juga sebagai kepala adat, melakukan penanganan pencegahan Covid-19 dengan pendekatan budaya mapalus.

Mapalus sendiri adalah budaya khas orang Minahasa dalam setiap langkah bersosialnya. Dalam penerapan masa kini mapalus telah banyak diadopsi sebagai sebuah gagasan dan ide yang mampu diterapkan dalam berbagai situasi. Mapalus awalnya lahir dari tradisi bertani atau berkebun orang Minahasa. Desa Kanonang Satu yang juga berkehidupan memiliki latar belakang budaya Minahasa ini, tak asing dengan spirit mapalus. Mapalus menjadi

solusi dalam penanganan berskala masif dan menyeluruh dalam strategi pemerintah guna menghadapi pandemi Covid-19. Mapalus hadir serta terus hidup dalam organisasi terkecil dalam republik, yakni desa karena desa dekat dengan alam dan masyarakatnya dekat dengan dunia pertanian dan mapalus merambat dalam penataan pembangunan desa.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui implementasi Program Mapalus Covid-19 di Desa Kanonang Satu. Hasil penelitian ini secara akademis dapat bermanfaat pada pengembangan teori, serta bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Administrasi Program Studi Administrasi Negara, hasil dari penelitian ini dijadikan dasar untuk pemerintah desa guna meningkatkan program-program desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan, yaitu:

Pertama, Meldy Elshaday Lumantow, Gustaaf Budi Tampi, Very Yohanis Londa, (2017). Pengaruh Budaya Mapalus terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa budaya mapalus memiliki besaran pengaruh yang kuat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi, semakin sering masyarakat mengimplementasikan budaya mapalus maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan mengalami peningkatan. Pengaruh budaya mapalus terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tombasian Atas, dijelaskan melalui indikator kerjasama, tolong-menolong dan kepentingan umum. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dijelaskan melalui indikator keterlibatan, menyumbang, dan situasi kelompok.

Kedua, Anna Feberina Ginting, Salmin Dengo, Helly F. Kolondam (2016). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado. Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado dapat di tarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut: Proses implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Manado dilihat dari empat aspek penting yang di kemukakan oleh Edward III, yaitu 1) Komunikasi: secara umum komunikasi antara kepala pimpinan dengan pegawai/staff pelaksana sudah jelas serta mudah di pahami serta instruksi atau perintah pimpinan terhadap staff pelaksana di sampaikan dengan baik. Tetapi sosialisasi dari pihak penyelenggara mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja belum berjalan dengan baik. 2) Sumber daya: fasilitas- fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti anggaran dana, fasilitas ruangan yang ada, komputer, AC, ruang administrasi, printer, peralatan pemrosesan data dan sarana pendukung pelayanan lainnya sudah memadai. Dilihat dari jumlah pegawai/staff pelaksana di kantor masih kurang. 3) Disposisi: dilihat dari sikap pegawai/staf pelaksana, bahwa masih ada pegawai yang lambat bekerja dalam proses pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan sehingga membutuhkan waktu yang lama. 4) Struktur Birokrasi: dilihat dari struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah baik dan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Ketiga, Marseni Tuandali, Joice Rares, Alden Laloma (2015). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Pemberdayaan masyarakat PNPM merupakan program nasional pengentasan kemiskinan sekaligus kemandirian masyarakat untuk tumbuh dan

berkembang ke arah tersebut, program PNPM dapat membantu masyarakat keluar dari masalah disabilitas dan kemiskinan, maka diperlukan kesiapan pemerintah daerah untuk menerima dan melaksanakan PNPM agar tetap dilanjutkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemberdayaan bersama (PNPM) kontrisida dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga di Kabupaten Halmahera Utara.

### **KONSEP TEORI**

Implementasi merupakan sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau juga aktivitas yang dilakukan dengan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme. karena begitu, maka implementasi tersebut bukan sekedar aktivitas, namun suatu kegiatan atau aktivitas yang terencana serta untuk mencapai tujuan kegiatan atau aktivitas. (Nurdin Usman,2002:70) Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones (Arif Rohman 2009: 101-102) menyebutkan implemetasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Mapalus adalah hakikat dasar dan aktivitas kehidupan orang Minahasa yang

terpanggil dengan ketulusan hati nurani yang mendasar dan mendalam (*Touching hearts*) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menjadikan manusia dan kelompoknya (*Teaching mind*) untuk saling menghidupkan dan mensejahterakan setiap orang dan kelompok dalam komunitasnya (*Transforming life*). Menurut buku, *The Mapalus Way*, mapalus sebagai sebuah sistem kerja yang memiliki nilai-nilai etos seperti, etos resiprokal, etos partisipatif, solidaritas, tanggung jawab, gotong royong, *good leadership*, disiplin, transparansi, kesetaraan dan *trust*.

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2018:9) menyatakan bahwa metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui:

- a. Observasi, yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004:76-77). Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data yang populer. Untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman

tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek (check list) atau daftar isian. Adapun aspek yang diobservasi meliputi berperilaku, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subjek tertentu dan sebagainya (Danim, 2002: 140). Dengan melakukan teknik observasi, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang dapat diluruskan dengan teknik wawancara.

- b. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002: 130). Instrumen yang digunakan dalam melakukan wawancara yaitu pedoman wawancara. Wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah informan yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan. Teknik wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang berisi inti atau pokok dari permasalahan yang ditanyakan kepada informan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Informan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan Program Mapalus Covid-19 di Desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa.

1. Hukum Tua : 1 orang
2. Tokoh Adat : 2 orang
3. Masyarakat : 4 orang

Disini peneliti menentukan tujuh informan yang menjadi sumber data dan informasi untuk penelitian ini. Penentuan para informan ini dikarenakan mereka adalah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Mapalus Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penataan penanganan Covid-19, harus memerlukan strategi khusus yang menyentuh masyarakat Desa Kanonang, dan salah satu hal yang digagas oleh pemerintah desa, hukum tua yang selain kepala pemerintahan juga sebagai kepala adat, melakukan penanganan pencegahan Covid-19 dengan pendekatan budaya mapalus.

Mapalus sendiri adalah budaya khas orang Minahasa dalam setiap langkah bersosialnya. Dalam penerapan masa kini mapalus telah banyak diadopsi sebagai sebuah gagasan dan ide yang mampu diterapkan dalam berbagai situasi. Menurut Siwu, mapalus bagi masyarakat Minahasa kegiatan tolong-menolong nampak pada pelaksanaan budaya mapalus dan menjadi pedoman masyarakat, hal ini didasarkan karena masyarakat Minahasa mempunyai rasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Budaya Mapalus orang Minahasa berakar pada budaya agraris di desa-desa, karenanya dapat dibedakan dengan gotong royong menjadi bagian hakiki dari mapalus (Turang, 1983:24).

Pada bagian ini akan membahas mengenai implementasi Program Mapalus Covid-19 di Desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa yang didasarkan pada teori dari Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana

dan kondisi sosial, ekonomi dan politik, yaitu sebagai berikut:

### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka sulit direalisasikan (Agustino 2006). Van Meter dan Van Horn (Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemerintah Desa Kanonang Satu membuat Program Mapalus Covid-19 dengan tujuan untuk mencegah masuknya Virus Corona di Desa Kanonang Satu dan menjaga ketahanan pangan masyarakat Desa Kanonang Satu di tengah pandemi Covid-19. Program pemerintah ini dapat berjalan jika ada kerjasama atau mapalus dari masyarakat dan pemerintah. Dalam implementasi program ini, adapun beberapa program yang dibuat oleh pemerintah yaitu pengadaan kelompok KANSAS Tuminanem, pengadaan pasar tradisional, pengadaan program JUMAN PROVID, dan masih banyak lagi, yang semuanya berhasil dilaksanakan karena adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

### 2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Van Meter dan Van

Horn (Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*Policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan".

Orang Kanonang adalah orang-orang yang mengerti dan paham untuk mengimplementasikan setiap program pemerintah, jadi memang konsep Tou Nga'asan betul-betul terbawa di Desa Kanonang. Meskipun dalam kesulitan karena pandemi, tetapi program pemerintah yang ditunjang masyarakat secara bersama-sama bergotong-royong boleh mengatasi setiap persoalan dan masyarakat terus bersama-sama dalam program ini. Memang mau tidak mau pemerintah disaat-saat seperti ini harus siap dan tanggap melihat situasi yang ada, karena kalau tidak cepat tanggap seringkali terjadi perubahan-perubahan aturan, pemerintah juga dituntut harus ada all out untuk melihat perkembangan yang terjadi dan itu menyangkut juga kompetensi dari pemerintah juga dari perangkat-perangkat yang ada bersama dengan BPD yang secara bersama-sama mengambil peran dalam tugas ini. Dalam alam bawah sadar masyarakat Kanonang yang hidup dari ajaran tradisi menunjukkan adanya satu frekuensi dalam menunjang program pemerintah dengan mapalus Covid-19, hal ini guna menghindari terjadinya bencana ekonomi dan kesehatan. Pengaruh tersebut juga hadir dari pemerintah desa sehingga pemerintah desapun mampu tanggap darurat mengimplementasikan Program Mapalus Covid-19. Yang menjadi kendala dari sumber daya manusia adalah karena keterbatasan pengetahuan bahaya dari Covid-19 mengakibatkan masih ada

masyarakat yang tidak mematuhi protokoler kesehatan terutama yang menyangkut nilai tradisi yang hidup di Kanonang.

### 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

Pemerintah Desa Kanonang Satu mengacu pada aturan dari Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pergub dan Perbup No. 5 Tahun 2020 tentang Penerapan Protap Covid-19 khususnya yang ada di Minahasa, kalau

bicara SOP (Standar Operasional Prosedur) berarti ada aturan, SOP didasarkan pada aturan-aturan yang dilaksanakan secara ketat dan tegas, jadi di Desa Kanonang Satu terus diingatkan kalau di Desa Kanonang Satu harus memakai masker dan mengikuti protap, dan masyarakat mengerti bahwa di Desa Kanonang Satu ada SOP atau aturan-aturan, sehingga menjadi standar bagi pelaksanaan implementasi kebijakan ini. Menurut salah satu masyarakat, prosedur operasi standar yang harus dimiliki adalah kesiapan, yaitu bagaimana masyarakat melaksanakan prosedur operasi standar dalam Program Mapalus Covid-19 dengan penuh kesiapan. Namun juga mengikuti peraturan-peraturan pemerintah pusat dalam menanggulangi pandemi ini. Karena masyarakat wajib untuk ikut serta dalam penanggulangan pandemi ini. Kepala daerah tentunya juga mengajak bukan hanya masyarakat tetapi juga yang pertama yaitu para perangkat desa untuk bersama menjalankan program ini.

#### 4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*Implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*Consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*Inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*Conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*Accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974).

Di samping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Kondisi lapangan mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Kanonang Satu, memiliki *Consistency dan uniformity*, dibuktikan dengan terlaksananya Program Mapalus Covid-19. Sehingga dalam waktu singkat dapat menangani permasalahan pandemik dengan juga tetap mempertimbangkan aspek perekonomian yang terjaga dalam lampu hijau bagi masyarakat Desa Kanonang Satu dan sekitarnya. Dalam hal ini komunikasi yang intens dan rapih dari Pemerintah Desa Kanonang Satu dengan hirarki organisasi ke atasnya, beserta forkopimda setingkat kecamatan dan kabupaten, yang dengan ini menjadikannya konsisten dan akurat dalam penanganan virus menular ini. Juga dari komunikasi ini menggali kembali nilai kultural yang terkandung di Desa Kanonang Satu yang dipakai sebagai ujung gagasan untuk mengendalikan situasi yang ada agar berjalan kondusif meski diterjang Covid-19 di kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 5. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi

kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*Befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*Implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*Cognition*), pemahaman dan pendalaman (*Comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*Acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*Frustrated*) ketika para pelaksana (*Officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*Implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*Implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*Crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu

potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*Implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*Performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Dalam kebijakan Program Mapalus Covid-19 ini jelas disposisi kebijakan Pemerintah Desa Kanonang Satu mengarah pada kepentingan masyarakat. Covid-19 yang telah menjadi lawan secara global sehingga menjadikan status kehidupan sosial berlabel pandemi. Dari disposisi arah kebijakannya terkesan mengutamakan keselamatan masyarakat Kanonang Satu. Keselamatan dari sisi kesehatan yang mana dalam kehidupan sosial menggunakan protokol covid-19 dengan penerapan *Social distancing* dan *Physical distancing*. Juga keselamatan keberlangsungan kehidupan masyarakat Kanonang Satu dengan mengadakan pasar Mapalus, yang mana hasil tani dijual untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat, juga menjalankan program bantuan sosial dengan sampai pada tangan yang tepat dengan mengandalkan mapalus dari sesama masyarakat sebagai bentuk pengawasan dalam penyaluran bansos.

#### 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Menurut pendapat Webster, mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang,

peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Pada sisi lain, Van Mater dan Van Horn, mengatakan bahwa *“Policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and subjectives set forth in prior policy decisions”* makna yang bisa ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.

Dari Program Mapalus Covid-19 yang diterapkan sebenarnya mengguncang tatanan sosial di Desa Kanonang Satu karena kultur masyarakat desa yang biasanya hidup komunal yang akhirnya harus dibatasi sesuai

protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah pusat. Tetapi, Mapalus Covid-19 ini sejatinya mengangkat nilai filosofis pada hakikatnya. Sebagai contoh dengan mapalus setiap elemen masyarakat bahu membahu menjaga pos Covid-19, dengan bergantian, serta masyarakat dengan kesadaran membawa makanan ke pos Covid-19 bagi petugas jaga dan relawan yang ada. Sektor ekonomi secara regional memang dihantam karena beberapa sumber kebutuhan masyarakat dibatasi dengan adanya pembatasan sosial. Akan tetapi, dari Program Mapalus Covid-19 dibuatkan pasar lokal di Desa Kanonang Satu, menjaga kestabilan ekonomi yang ada.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Mapalus Covid-19 adalah program dari pemerintah, implementasi Program Mapalus Covid-19 di Desa Kanonang Satu sudah berjalan dengan baik dan perlu terus ditingkatkan. Hal ini didasarkan pada temuan penelitian sebagai berikut:

1. Program Mapalus Covid-19 memiliki standar dan sasaran kebijakan terhadap penanganan masalah pandemi ini. Dengan standarisasi menghindari terpaparnya virus menular kepada masyarakat Desa Kanonang Satu, dan menjaga kestabilan sektor ekonomi dengan tetap menjunjung budaya komunal dengan tradisi mapalus.
2. Terlihat dari segi sumber daya, Program Mapalus Covid-19 menggunakan sumber daya manusia dari Desa Kanonang Satu, warga Desa Kanonang Satu yang sudah semakin modern tetapi masih menjaga tradisi komunal dan sepenanggungan dikembangkan dalam program ini.
3. Kondisi karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa Kanonang Satu, sangat proaktif memandang permasalahan Covid-19

ini, dengan sigap mengambil langkah Program Mapalus Covid-19. Pemerintah Desa Kanonang Satu terkesan tidak menutup mata merangkul pihak terkait dalam penanganan bersama ini. Hal ini merujuk pada karakteristik Tou Kanonang dengan berlandaskan pada filosofi Mapalus.

4. Dalam kondisi komunikasi antar organisasi terkait, berjalan rapih, karena dalam Program Mapalus Covid-19 ini yang paling diutamakan adalah komunikasi, terbukti komunikasi dari Pemerintah Desa Kanonang Satu berjalan dua ranah, dalam taraf ke atas secara hirarkis birokrasi, dan ke bawah ke masyarakat dan elemen masyarakat di Desa Kanonang Satu.
5. Disposisi atau sikap para pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa Kanonang Satu, berpihak pada pemenuhan kebijakan nasional untuk menangani masalah Covid-19. Akan tetapi terlihat dari Program Mapalus Covid-19 disposisi pelaksanaannya mengarah pada kesehatan fisik dan kestabilan ekonomi masyarakat.
6. Covid-19 menghantam lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Desa Kanonang Satu, kebijakan Mapalus Covid-19 secara politik dinilai baik oleh masyarakat Desa Kanonang Satu, tetapi pandemi membatasi dari sisi sosial (seperti ibadah, acara syukuran, kedukaan, kegiatan sosial lainnya). Ekonomi, walau dihantam tapi masih berjalan dengan adanya pasar mapalus yang memenuhi kebutuhan lokal masyarakat.

## SARAN

Secara nasional ini menjadi percontohan bagi desa-desa dalam penanganan masalah pandemi. Dengan ini Desa Kanonang Satu menawarkan program yang berakar dari nilai kultural yang ada

untuk menjadi pilar utamanya. Selanjutnya, dalam Program Mapalus Covid-19 di Desa Kanonang Satu perlu terus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus tetap memperhatikan standar dan sasaran kebijakan terhadap penanganan masalah pandemi ini, agar tetap terhindar dari terpaparnya virus menular dan tetap menjaga kestabilan sektor ekonomi dengan tetap menjunjung budaya komunal dengan tradisi mapalus. Pemerintah harus lebih meningkatkan program-program yang mendorong kreativitas masyarakat guna untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.
2. Dari segi sumber daya, Program Mapalus Covid-19 menggunakan sumber daya manusia dari Desa Kanonang Satu, warga Desa Kanonang Satu yang sudah semakin modern tetapi masih menjaga tradisi komunal dan sepenanggungan dikembangkan dalam program ini. Di sisi pemerintah harus terus mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat secara aktif ikut ambil bagian dalam Program Mapalus Covid-19 ini.
3. Kondisi karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa Kanonang Satu, sangat proaktif memandang permasalahan Covid-19 ini, namun pemerintah harus tetap sigap mengambil langkah guna menunjang Program Mapalus Covid-19, dan pemerintah harus tetap menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat dalam menunjang program ini.
4. Dalam kondisi komunikasi antar organisasi terkait harus tetap dipertahankan, karena yang diutamakan dalam mapalus ini adalah komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah. Dalam sisi ini, pemerintah perlu

membangun kesadaran dengan segala daya dan upaya yang ada untuk menumbuhkan rasa gotong royong dalam program kebijakan pemerintah, serta menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa Kanonang Satu. Disposisi pelaksanaannya mengarah pada kesehatan fisik dan kestabilan ekonomi masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus tetap lebih meningkatkan program-program yang mendorong kreativitas masyarakat guna untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.
6. Dilihat dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Desa Kanonang Satu, pemerintah harus lebih meningkatkan sarana prasarana dalam kegiatan bersosial masyarakat, seperti alat untuk multimedia untuk gereja atau kegiatan sosial lainnya, agar dapat dinilai baik secara sosial maupun politik oleh masyarakat. Dan pemerintah harus lebih meningkatkan para penjual di pasar, agar supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus keluar desa untuk membeli keperluan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Sri Wahyudi. 1996, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, hal: 19
- Jeni Nelwan, dkk. 2018. *Role of Mapalus Culture by Minahasa Ethnic in North Sulawesi to the Coronary Heart Disease Incidents*. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 8, Issue 3, March. Hlm 45-52.
- Meldy Elshaday Lumantow, Gustaaf Budi Tampi, Very Yohanis Londa, 2017. *Pengaruh Budaya Mapalus terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT. 2017
- Anna Feberina Ginting, Salmin Dengo, Helly F. Kolondam (2016). *Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT. 2016
- Marseni Tuandali, Joice Rares, Alden Laloma (2015). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT. 2015
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Dye, T.R., 1978
- Umbas, Veldy, *The Mapalus Way*, 2011
- Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Depdiknas. 1995
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press. 2009
- Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial
- Leo Agustino, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta. Dr. Arifin Tahir, M.Si, 2014
- Widodo. 1974. *Pengukuran Kerja*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi. Universitas Gadjah Mada. Yulia, E. 2001.
- Siti Erna Latifi Suryana, 2009. *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh*. Tamiang, 2009. Judul Tesis

Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta. Slameto.

Slameto. 2010. *Belajar dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Subadi, Tjipto. 2010

Sumber lain:

SE No. 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai

Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2020 tentang Penerapan Protap Covid-19